

SUARA DARI PENGASINGAN: EKSIL INDONESIA DI BELANDA SEBAGAI PENJAGA INGATAN KOLEKTIF DAN HARAPAN DEMOKRASI (1988-2006)

Ilmiawati Safitri, Nanang Setiawann

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: ilmiawatisafitri@uny.ac.id, nanangsetiawan@uny.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas peran kaum eksil Indonesia di Belanda dalam mendukung proses demokratisasi Indonesia dan usaha mempertahankan rasa nasionalisme mereka di Belanda dalam kurun waktu 1988-2020. Para eksil tidak hanya hadir menjadi saksi sejarah, tetapi juga berperan aktif dalam membangun narasi alternatif tentang Indonesia dari luar negeri. Melalui media cetak, forum diskusi, jaringan solidaritas internasional serta kanal digital pada era pascareformasi. Para eksil mempertahankan wacana kritis terhadap kekuasaan, melestarikan dokumentasi sejarah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap arah masa depan Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode sejarah, melalui heuristik penelusuran arsip, dokumen organisasi diaspora, film dokumenter, wawancara lisan dan literatur pustaka pendukung lainnya. Dilanjut dengan verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun identitas kaum eksil Indonesia telah menjadi warga negara asing, demokrasi menjadi alat perjuangan mereka dalam melawan kekuasaan yang dianggap tidak adil terhadap rakyat. Kaum eksil Indonesia di Belanda berperan penting dalam menjaga identitas nasional sekaligus mendorong demokrasi di Indonesia dengan menjadikan nasionalisme sebagai kendaraan untuk perubahan politik yang lebih inklusif dan demokratis. Penelitian ini berupaya menyoroti bagaimana kaum eksil memaknai pengasingan sebagai ruang perjuangan, bukan sekadar keterpisahan fisik sehingga banyak orang memaknainya sebagai *nasionalisme jarak jauh*.

Kata Kunci: Eksil, Belanda, Indonesia, Demokrasi

Abstract

This paper discusses the role of Indonesian exiles in the Netherlands in supporting the democratization process of Indonesia and efforts to maintain their sense of nationalism in the Netherlands in the period 1988-2020. The exiles were not only present as witnesses to history, but also played an active role in building alternative narratives about Indonesia from abroad. Through print media, discussion forums, international solidarity networks, and digital channels in the post-reformation era. The exiles maintained critical discourse on power, preserved historical documentation, and contributed ideas to the future direction of Indonesia. The research method is a historical method, through heuristic archival searches, diaspora organization documents, documentary films, oral interviews, and other supporting literature. Continued with verification, interpretation, and historiography. The results of this study show that although the identity of Indonesian exiles has become foreign citizens, democracy has become a tool for their struggle against power that is considered unfair to the people. Indonesian exiles in the Netherlands play an important role in maintaining national identity while encouraging democracy in Indonesia by making nationalism a vehicle for more inclusive and democratic political change. This study aims to explore how exiles perceive exile as a space for struggle, rather than merely physical separation, thereby leading many to interpret it as a form of long-distance nationalism.

Keywords: Exile, Netherlands, Indonesia, Democracy.

PENDAHULUAN

“Sebanyak 134 eksil korban peristiwa 1965 di luar negeri, berdasarkan data sementara ini, akan dinyatakan sebagai "bukan pengkhianat negara" karena disebut "tidak terlibat" dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan jumlah itu bisa bertambah seiring dengan pendataan,

-Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,
(Tempo.co, 2023)

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan usai mengikuti rapat dengan Presiden saat itu Joko Widodo pada Selasa, 2 Mei 2023 di Istana Kepresidenan. Rapat ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Salah satu hal penting yang diakui adalah nasib para eksil yang terdampak peristiwa G30S 1965. Mahfud menjelaskan bahwa tragedi tersebut telah menyebabkan banyak orang menjadi korban, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri dan tidak diizinkan kembali ke tanah air (Tempo.co, 2023). Pasca Mahfud MD mengadakan pertemuan dengan eksil Indonesia di Belanda dengan janji akan memberikan kemudahan pelayanan imigrasi kepada para eksil yang ingin kembali ke Indonesia belum sesuai dengan harapan para eksil itu sendiri. Dilansir dari wawancara Awaludin kepada Wati seorang aktivis HAM 1965 “Penawaran visa tersebut seperti tindakan simbolis yang kurang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang kami derita. Kami mengharapkan permintaan maaf resmi dari negara dan penyelesaiannya secara yudisial-secara hukum, termasuk pencabutan TAP MPR No XXV/MPRS/1966. Namun, realisasi dari harapan ini tampaknya masih jauh dari kenyataan” (Awaludin, 2024).

Harapan-harapan dari tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia di bawah naungan Joko Widodo tersebut, seharusnya bisa membawa nafas segar bagi demokrasi Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kebijakan-kebijakan humanis yang diharapkan oleh para eksil, seperti yang diungkapkan Wati pada tahun 2023. Walaupun lambat laun hingga saat ini di masa pemerintahan

Presiden Prabowo, pengungkapan kasus-kasus kelam pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kasus 1965-1966 kembali meredup.

Menilik sedikit ke belakang, pada tahun 2012 dan awal 2013 ada dua peristiwa penting terkait kejahatan yang terjadi pada tahun 1965-1966. Pertama, dikeluarkannya tiga dokumen penting yang berisikan: (1) Laporan temuan lapangan Komnas HAM mengenai kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu 1965-1966. (2) Dirilisnya film dokumenter yang berjudul *The Act of Killing*. Film tersebut berisikan dokumentasi sumber lisan para pelaku kekerasan dan genosida 1965-1966. Film ini disutradarai oleh Joshua Lincoln Oppenheimer, dan (3) Tempo melakukan liputan investigasi mengenai para jagal peristiwa 1965-1966. Liputan ini merupakan satu usaha guna melanjutkan kebenaran yang telah dilakukan Joshua dan kawan-kawan dalam film dokumentasi yang telah dibuat (Akmaliah, 2015). Selanjutnya pada bulan Februari, 2013 para sarjana Indonesia mengadakan konferensi di ANU (Australian National University) dengan tema "New Perspectives on the 1965 Violence in Indonesia".

Pada tanggal 9-13 November 2016 dilaksanakan Konferensi Internasional 1965-1966 yang bertajuk "Rekonsiliasi Sejarah dengan Tragedi 1965-1966" di Universitas Goethe, Frankfurt Jerman. Konferensi ini dihadiri oleh para ilmuwan, sejarawan, peneliti, para ahli, mahasiswa, seniman, pegiat HAM dan Demokrasi serta Korban Pelanggaran HAM 65 yang datang dari berbagai negara termasuk Indonesia. Konferensi ini menjadi satu pijakan penting bagi demokratisasi Indonesia. Dunia menjadi semakin tahu mengenai kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi di Indonesia dengan militer sebagai dalangnya. Jutaan jiwa yang meninggal akibat genosida 1965, sampai pada saat konferensi tersebut digelar belum dipertanggung jawabkan oleh pemerintah (Untung, 2016). Di akhir konferensi, Indonesia sebagai anggota PBB didesak untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan HAM tersebut.

Peristiwa G30S 1965 menjadi titik balik yang membawa dampak besar bagi perjalanan sejarah Indonesia. Dalam kurun waktu 1965 hingga 1966, masyarakat Indonesia mengalami masa-masa kelam penuh kekerasan. Banyak dari mereka

yang masih hidup saat itu harus menyaksikan secara langsung aksi pembunuhan, pembantaian yang terjadi secara masif. Kampanye propaganda yang menyebar luas memicu ketakutan dan kepanikan di segala penjuru negeri. Diperkirakan lebih dari setengah juta jiwa penduduk Indonesia pada saat itu kehilangan nyawa tanpa proses hukum yang adil. Para korban dituduh memiliki hubungan dan keterkaitan dengan partai yang dianggap terlarang saat itu yaitu PKI (Partai Komunis Indonesia). Tuduhan kepada para korban tanpa dasar seperti tuduhan menganut paham kiri atau komunisme, serta tuduhan keterlibatan para korban dalam peristiwa pembunuhan paa jenderal pada 1 Oktober 1965.¹ Tragedi ini meninggalkan luka mendalam hingga masa kini, terlebih korban-korban yang dibiarkan masih hidup, menjalani sisa usia dengan trauma yang tak akan pernah bisa dilupakan.

Tulisan ini berangkat dari permasalahan, bagaimana para eksil Indonesia di Belanda berkontribusi dalam menjaga ingatan kolektif dan menumbuhkan harapan demokrasi dari luar negeri? Luar negeri dalam penelitian ini adalah Belanda sebagai salah satu negara acuan utama para eksil untuk mencari suaka politik. Rentang waktu yang dipilih adalah tahun 1988, karena pada tahun ini berdiri untuk pertama kalinya organisasi yang beranggotakan para eksil 1965 di Belanda. Tahun 2020 diyakini menjadi tahun kemajuan bagi HAM Indonesia, hingga pada akhir masa pemerintahan Jokowi, pemerintah menyatakan bahwa para eksil “bukan pengkhianat negara”.

¹ Hingga sekarang belum ada ahli atau lembaga yang dapat memastikan berapa jumlah orang yang meninggal dalam peristiwa G30 September. Masyarakat sipil yang meninggal diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Sedangkan sejumlah masyarakat Indonesia yang dicap “PKI” oleh pemerintah dan terpaksa dipenjara dengan gelar tahanan politik (tapol) mencapai setengah juta jiwa. Rezim Soeharto pada saat itu memberikan informasi dalam angka statistik yang berbeda dari tahun ke tahun. Pada 1981, pejabat pemerintahan Soeharto mengatakan bahwa ada 1,5 juta eks-tapol. Empat tahun kemudian, para pejabat mengatakan jumlah mereka sebenarnya 1,7 juta jiwa. Kemudian, Tri Sutrisno dalam wawancara sebuah majalah mengatakan bahwa jumlah eks-tapol mencapai 1,8 juta jiwa. Mungkin saja jumlah mereka lebih besar dari itu. Lihat dalam John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid (ed), *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*, (Jakarta: Elsam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Institut Sejarah Sosial Indonesia), 2004, hlm. 9

Komunitas eksil yang dimaksud merujuk pada warga negara Indonesia yang saat peristiwa politik 1965 terjadi, sedang berada di luar negeri, khususnya di negara-negara sosialis untuk berbagai keperluan. Diantaranya keperluan untuk menjalankan tugas diplomatik di organisasi regional atau internasional, menempuh studi lanjut, maupun urusan profesional lainnya. Mereka kemudian tidak dapat kembali ke tanah air akibat perubahan situasi politik. Istilah “eksil ini pernah disebut oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai “kaum kelayapan”, sementara Hersri Setiawan menyebut mereka sebagai “orang-orang yang terhalang pulang” (Setiawan, 2004). Orang-orang yang terhalang pulang ini dicabut paspornya secara paksa. Pasca pencabutan paspor, eks-mahasiswa Indonesia di berbagai negara secara otomatis kehilangan kewarganegaraan. Hak dan kewajiban yang mengikat sebagai seorang Warga Negara Indonesia turut hilang, seperti tidak berlakunya kembali hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Seluruh eks-mahasiswa yang dicabut paspornya tidak diperkenankan untuk kembali lagi ke Indonesia dan berstatus sebagai *stateless*, tanpa kewarganegaraan. Kebijakan yang diberlakukan pemerintah Orde Baru ini memberikan kerugian besar bagi Indonesia, yaitu hilangnya satu generasi intelektual yang tercermin dalam kisah para eksil yang merupakan mahasiswa yang dikirim Soekarno sebagai kader pelengkap revolusi yang diimpikannya.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai kaum eksil tahun 1965-1966 telah banyak dilakukan. Sedangkan penelitian yang berfokus pada posisi dan kontribusi para eksil Indonesia di Belanda dalam menjaga ingatan kolektif dan mendorong demokrasi belum pernah dilakukan. Beberapa studi sebelumnya diantaranya adalah artikel yang berjudul *Indonesian political exiles in the Netherlands after 1965; Postcolonial nationalists in an era of transnationalism* karya David T. Hill. Hill menjelaskan beberapa bentuk komitmen politik para eksil, seperti penolakan mereka untuk menerima otoritas pemerintah militer Soeharto dan kesetiaan mereka kepada Presiden Soekarno yang dikudeta. Komitmen terhadap keyakinan politik mereka tak usah diragukan, bahkan mereka rela mengorbankan dengan menjadi *stateless* atau orang tanpa kewarganegaraan (David, 2022).

Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada bentuk perjuangan para eksil guna menuntut keadilan kepada pemerintah Indonesia dari jarak jauh.

Karya selanjutnya adalah tulisan Amin Mudzakkir yang berjudul *Living in Exile: The Indonesian Political Victims In the Netherlands*. Artikel ini menyorot bagaimana kondisi para eksil 1965 yang akhirnya memilih suaka di Belanda sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1988. Kondisi psikologis para eksil dijelaskan cukup detail oleh Amin. Kehidupan para eksil dianggap lebih baik dibanding mereka yang dijadikan tahanan politik oleh rezim Orde Baru di Indonesia. Akan tetapi, nyatanya secara psikologis dan mental mereka mengalami traumatis mendalam, karena terputusnya hubungan mereka dengan keluarga dan kerabat di Indonesia. (Mudzakkir, 2015). Melanjutkan dari penelitian Amin Mudzakkir, penulis berusaha menceritakan mengenai bagaimana perjuangan para eksil, khususnya di Belanda dengan mendirikan beragam komunitas dan organisasi. Yang mana, belum di bahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Terakhir, yaitu pembahasan mengenai diaspora sebagai komunitas yang tinggal di luar negara asalnya memiliki pengaruh cukup signifikan dalam proses politik di tanah air. Karya Rainer Baubock dan Faist Thomas (ed) yang berjudul *Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods*. Dalam buku ini dibahas mengenai diaspora dapat berfungsi sebagai jembatan antara negara asal dan negara tempat mereka bersuaka. Diaspora atau para eksil dapat memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan, sumber daya dan dukungan politik (Faist, 2010). Berkaitan dengan penelitian ini mengenai peran kaum eksil Indonesia di Belanda dalam mendukung demokrasi di tanah air sebagai upaya keterlibatan mereka dalam advokasi politik dan perjuangan demokrasi. Juga menguntungkan bagi para pelajar Indonesia dalam beradaptasi di Belanda, seperti pertemuan dan diskusi pelajar Indonesia yang diselenggarakan oleh para eksil.

METODE

Dalam penelitian ini, metode sejarah digunakan untuk menelusuri secara sistematis jejak-jejak kehidupan para eksil politik Indonesia pasca-1965 di Belanda. Meliputi pencarian sumber atau heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi dan

terakhir adalah penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 2003). Proses ini diawali dengan heuristik, yakni tahap pengumpulan sumber sejarah, baik berupa arsip pribadi, surat kabar diaspora, surat kabar Kompas, wawancara lisan (melalui transkrip rekaman yang disimpan dalam website), maupun dokumen organisasi eksil seperti Perhimpunan Indonesia yang didapat dari website resminya. Ditambahkan dengan referensi artikel-artikel jurnal yang berkaitan. Heuristik menjadi fondasi penting karena eksil tidak selalu tercatat dalam narasi sejarah resmi, sehingga peneliti harus cermat dalam menjangkau sumber-sumber alternatif yang tersebar di berbagai tempat, termasuk arsip-arsip Belanda.

Setelah sumber dikumpulkan, peneliti melakukan kritik sumber, baik secara internal (menilai keaslian dan kredibilitas isi dokumen) maupun eksternal (menilai kondisi fisik dan konteks produksi sumber). Kritik ini penting untuk memilah informasi yang sah dari yang bias atau propaganda, apalagi karena narasi eksil sering kali berseberangan dengan narasi negara. Misalnya, kesaksian para eksil perlu dibandingkan dengan laporan pers atau dokumen intelijen untuk mengungkap ketegangan antara identitas mereka sebagai warga negara Indonesia dan status mereka sebagai pengasing politik. Proses ini menegaskan pentingnya pendekatan kritis terhadap sumber sejarah yang penuh lapisan ideologis.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi dan historiografi, di mana peneliti merangkai temuan-temuan menjadi narasi sejarah yang utuh. Interpretasi memungkinkan pembacaan ulang atas peran para eksil tidak sekadar sebagai korban represi, tetapi juga sebagai aktor yang aktif membangun jaringan solidaritas internasional dan menyuarakan demokrasi dari luar negeri. Dalam penulisan historiografi, penelitian ini menempatkan eksil Indonesia sebagai bagian dari sejarah global pascakolonial dan memperkaya wacana memori kolektif bangsa. Dengan demikian, metode sejarah ini tidak hanya menghidupkan kembali suara yang terpinggirkan, tetapi juga merekonstruksi sejarah Indonesia dari sudut pandang yang lebih inklusif dan transnasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjalanan Mula, Migrasi Orang Indonesia ke Belanda

Dilansir dari penelitian milik Gusnelly (Gusnelly, 2017), perjalanan panjang migrasi orang Indonesia ke Belanda pertama kali dilakukan pada awal tahun 1600an yaitu seorang duta besar Kasultanan Aceh untuk Belanda yang bernama Abdus Zamed. Ia bekerja, menetap hingga meninggal dan dimakamkan di Belanda. Di akhir tahun 1700an, banyak penduduk pribumi dan keturunan *Indo* (campuran Jawa, Eropa/Belanda) yang mulai berdatangan ke Belanda. Pada periode ini para pribumi maupun *Indo* sudah memeluk agama kristen, sehingga kemampuan berbahasa Belanda yang dimiliki cukup baik. Pada awal awal tahun 1900an sejumlah anak-anak muda Indonesia diundang ke Belanda untuk menempuh pendidikan sebagai dampak dari diberlakukannya politik etis (*De ertsche politiek*) dan melahirkan generasi pelopor gerakan nasionalisme di Hindia Belanda. Kemudian di tahun 1930an terjadi migrasi tenaga kerja dalam berbagai sektor, yaitu para pekerja kapal, pekerja restoran dan tenaga kasar lainnya di bidang industri.

Migrasi terus berlanjut pada periode awal tahun 1940-1945 terjadi migrasi besar-besaran orang *Indo* dan sejumlah penduduk Indonesia ke Belanda karena Jepang menduduki Indonesia. Pada tahun 1950 banyak masyarakat Maluku yang bermigrasi ke Belanda, hal ini dimotori karena mereka mendukung pemerintahan Belanda dan menjadi anggota tentara kerajaan Hindia Belanda (KNIL). Ketakutan akan ancaman, pemberontakan dan diskriminasi membuat banyaknya orang Maluku yang bermigrasi ke Belanda. Pada tahun 1957 terjadi migrasi para keturunan *Indo* karena diberlakukannya undang-undang kewarganegaraan yaitu UU No. 62 tahun 1958. Tahun 1958 adalah gelombang masuknya orang-orang yang tidak menerima kebijakan nasionalisasi di Indonesia.

Di tahun 1956 masyarakat Indonesia yang notabene adalah keturunan Tionghoa melakukan migrasi cukup massif ke Belanda karena kondisi politik Indonesia yang kacau dan tidak stabil. Pada tahun selanjutnya 1977-1989, migrasi dilakukan oleh pribumi Indonesia yang berstatus pelajar atau mahasiswa yang terkait dengan peristiwa tahun 1965. Pada tahun 1970an pemerintah Belanda

meminta untuk mengisi kekurangan tenaga kerja keperawatan di Belanda. Perekrutan tenaga perawat ini berlangsung hingga akhir tahun 1990an. Sejarah dan perjalanan panjang kedatangan masyarakat Indonesia ke Belanda sejak abad 17, membuat beberapa eksil 1965 memilih Belanda sebagai suaka, tempat perlindungannya.

B. Belanda sebagai Suaka, Konsentrasi Eksil 1965

Setelah peristiwa 30 September 1965, rezim Orde Baru yang berkuasa melakukan pencabutan paspor secara sepihak terhadap ribuan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Ini adalah bagian terburuk dari kisah kaum eksil. Segera setelah pihak kedutaan besar yang dibantu oleh tim khusus melakukan penyaringan warga negara Indonesia di luar negeri (Mudzakkir, 2015). Mereka yang terkait atau dituduh terlibat dengan PKI, atau simpatisan Presiden Soekarno dicabut paspornya secara sewenang-wenang. Hak mereka sebagai warga negara dihilangkan sepenuhnya, sehingga mereka tidak dapat pulang ke Indonesia. Sebagian besar eksil ini awalnya berada di negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet, Cina, Albania, Praha dan beberapa negara di Eropa Timur. Namun setelah runtuhnya komunisme pada akhir tahun 1980an banyak dari mereka bermigrasi ke negara-negara Eropa Barat, termasuk Belanda, yang menjadi tempat tinggal utama bagi puluhan eksil Indonesia.

Belanda menjadi salah satu negara tujuan para eksil karena beberapa pertimbangan karena: (1) Jaringan sosial di Belanda. Terlepas dari belum atau tidak adanya kerabat atau saudara yang tinggal di Belanda, organisasi aktivis HAM di Belanda membuka undangan untuk para eksil supaya datang ke Belanda. Tidak hanya itu, jaringan sosial tersebut juga meliputi kolega-kolega yang terlebih dahulu menetap, organisasi gereja, wartawan dan organisasi politik yang bernama *Communist Partij Netherland* (Sipayung, 2011). Jaringan-jaringan itulah yang akan membantu para eksil dalam mendapatkan suaka Belanda. (2) Di masa lampau Indonesia yang merupakan koloni Belanda, sehingga komunitas masyarakat Indonesia asli maupun Indo (campuran Belanda dan Indonesia) banyak ditemukan. Selain itu terdapat peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda mengenai

hak politik sosial bagi penduduk masyarakat Indonesia, bahwa mereka yang lahir sebelum 1949 akan dianggap sebagai bagian dari koloni Belanda. Ketetapan inilah yang dimanfaatkan oleh eksil untuk mengajukan suaka kepada pemerintah Belanda. Di lain sisi, para eksil yang datang sebelum runtuhnya Uni Soviet lebih beruntung karena dapat mendaftarkan diri secara langsung menjadi penduduk tetap, bukan hanya sebagai pencari suaka.

Belanda diperkirakan menjadi negara dengan jumlah eksil politik Indonesia tahun 1965 terbanyak, meskipun hingga saat ini belum tersedia data yang komprehensif. Banyak warga negara Indonesia yang tidak dapat kembali ke tanah air, yang mulanya tersebar di berbagai negara belahan dunia, akhirnya mencari suaka dan menetap di Belanda. Sehingga keberadaan para eksil menyatu di Belanda. Menurut keterangan salah satu tokoh senior komunitas eksil di Belanda yang bernama Sungkono, saat ini (tahun 2023) hanya sekitar 50 orang eksil langsung (tidak termasuk keturunan mereka) yang masih hidup di negara tersebut. Sebagian besar eksil lainnya telah meninggal dunia (Bonasir, 2023).

Para eksil harus melewati proses yang cukup panjang untuk memperoleh suaka dari Belanda. Dalam prosesnya, para eksil harus terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui perwakilan negara suaka yang dituju. Di awal pendaftaran hanya kepala keluarga sebagai pemohon suaka dan jika diterima akan ditetapkan oleh *Immigration and Naturalization Services* (IND) yang memiliki wewenang menerima atau menolak pengajuan suaka. Setelah diterima, para eksil akan mendapatkan penempatan di barak-barak yang satu kamar diisi oleh tiga atau lebih pengungsi. Kemudian apabila para eksil ini terdiri dari keluarga cukup besar (ayah, ibu, beberapa anak) maka akan diberikan kamar yang sesuai dengan kebutuhan. Hal baik lainnya adalah para eksil juga akan mendapatkan uang saku sebesar €55 per orang di tiap pekan (Gusnelly, 2017).

C. Organisasi dan Aktivitas Eksil di Belanda

Identitas baru yang disandang oleh para eksil Indonesia di Belanda kerap kali hanya bersifat administratif dan terbatas pada dokumen resmi. Secara ideologis dan emosional, mereka tetap mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa

Indonesia. Kehadiran mereka di tanah rantau tidak mengurangi komitmen politik yang mereka miliki terhadap tanah air. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya nilai-nilai nasionalisme yang ditanamkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Faktor tersebut yang akhirnya memberikan corak atau nuansa lain antara komunitas diaspora eksil dengan komunitas diaspora lainnya, Maluku misalnya. Komunitas diaspora Maluku di Belanda mengembangkan nasionalisme berdasarkan status mereka sebagai pendatang yang menuntut pengakuan kewarganegaraan Belanda, berlandaskan janji Kerajaan Belanda. Sebaliknya, para eksil Indonesia membangun bentuk nasionalisme yang khas, sehingga memiliki istilah tersendiri, yaitu *nasionalisme jarak jauh*. Konsep ini sebagaimana dijelaskan oleh Schiller, merujuk pada keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik yang berkaitan dengan Indonesia, meskipun para pelakunya tidak lagi secara resmi menjadi warga negara Indonesia. Nasionalisme ini bersifat transnasional dan tetap mempertahankan keterikatan yang kuat antara individu eksil dan Indonesia (Akmaliah, 2015).

Pasca pindah ke Belanda, sebagian besar eksil tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, bahkan satu di antaranya memutuskan untuk menjadi pegawai gelap di Belanda untuk bertahan hidup atau tidak bekerja sama sekali karena pertimbangan kesehatan dan kesempatan lapangan kerja yang minim. Selama di Belanda, para eksil juga disibukkan dengan berbagai kegiatan organisasi yang dibina oleh perkumpulan eksil Indonesia di Belanda sesuatu dengan fokus masing-masing. Sebagian besar terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Persaudaraan dan sebagian lainnya memilih untuk bergabung dengan organisasi perempuan serta organisasi-organisasi yang berlandaskan politik, seperti Komite Nasional dan Lembaga Pembela Korban 65 (LPK65).

Khusus untuk kalangan eksil 1965, jumlah organisasi yang dibentuk di Belanda kurang lebih terdapat 7 organisasi, yaitu Perhimpunan Persaudaraan Indonesia, Perhimpunan Dokumentasi Indonesia (Perdoi), *Stichting* (yayasan) DIAN, Yayasan Lembaga Kebudayaan dan Sejarah, Komite Indonesia dan Lembaga Pembela Korban 65. Berikut ulasan singkat mengenai organisasi tersebut

1. Perhimpunan Persaudaraan Indonesia

Perhimpunan Persaudaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama “Persaudaraan” merupakan organisasi eksil terbesar di Belanda. Pendirian awalnya tidak lepas dari peran Mr. Wiyanto (seorang pekerja sukarela di organisasi *Vereeniging Vluchtelingen Nederland* (VVN)). VVN sendiri merupakan sebuah organisasi yang mengurus dan membantu pencari suaka Belanda dari berbagai negara, termasuk eksil-eksil dari Asia dan Afrika yang merupakan pendatang terbanyak di Belanda. Eksil-eksil dari kedua benua ini mendirikan organisasinya masing-masing. Untuk itu, Mr. Wiyanto mengusulkan kepada para eksil Indonesia untuk mendirikan organisasi yang serupa. Diharapkan dengan adanya wadah dengan visi misi yang sama, dapat menjadikan para eksil Indonesia berdiskusi, konsultasi dan bekerja sama. Awalnya wadah ini ditentang oleh banyak pihak, karena bernuansa politis. Para eksil akhirnya mengusulkan supaya wadah ini berasaskan kekeluargaan dan bersifat *paguyuban*. Maka disepakati organisasi ini bernama Perhimpunan Persaudaraan Indonesia atau dikenal “Persaudaraan” pada Desember 1988. Kegiatan yang diadakan diantaranya adalah perayaan tahun baru bersama, diskusi publik dan pemutaran film, juga arisan anggota eksil dengan agenda rutin *sharing*, ceramah, hingga diskusi isu politik di Indonesia. Persaudaraan juga menjadi jembatan komunikasi dan tali kekerabatan antar eksil Indonesia yang berada di Belanda. Pada saat kegiatan *International People's Tribunal* yang dilaksanakan di Den Haag pada tahun 2015, Persaudaraan juga berpartisipasi aktif di dalamnya (Huda, 2018)

2. *Stichting* DIAN

Satu tahun sebelum Perhimpunan Persaudaraan resmi didirikan, *stichting* DIAN yang merupakan wadah organisasi perempuan Indonesia di Belanda sudah lebih dahulu dibentuk pada tahun 1987, organisasi ini bergerak sebagai pengamanan sosial untuk sekelompok perempuan Indonesia di Belanda dengan tujuan untuk menebarkan semangat hidup di kalangan masyarakat. Di awal pembentukannya, yayasan DIAN juga berperan membantu kaum imigran yang memiliki masalah dalam permasalahan hukum atau pengadilan. Sejak berdiri di

tahun 1987, *stichting* DIAN memiliki berbagai kegiatan dan program kerja yang rutin dilaksanakan di setiap tahunnya. (Hill, 2022) Beberapa kegiatan yang diadakan adalah, *Culturele Dag in 't kader van Kartini -Dag*, *Diskussiebijeenkomst in Leiden*, Pelatihan Kepemimpinan Perempuan atau yang disebut *Training Vrouwelijk Leiderschap*, Pertemuan *Information Day*, dan melakukan kerja sama dengan *Institute on gender equality and women's history*.

3. Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia

Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia (YSBI) didirikan pada tahun 1991 di Amsterdam, Belanda. Ide pembentukan YSBI sendiri dicetuskan oleh Hersri Setiawan, beranggotakan sastrawan-sastrawan yang berasal dari berbagai latar belakang, baik sastrawan Lekra maupun bekas wartawan *Harian Rakyat*. Kegiatan apa saja yang diadakan dalam YSBI ini? Diantaranya adalah penerbitan majalah yang bernama ARAH, penerbitan buku *Di Negeri Orang: Puisi Penyair Indonesia Eksil* yang bekerja sama dengan penerbit Amanah Lontar dan pertunjukan sayembara puisi yang diadakan secara periodik, Selain itu, YSBI juga berperan dalam pengumpulan rekaman wawancara beberapa orang eksil mengenai peristiwa sekitar G30S, dan sejak 2014 lalu YSBI sudah tidak terlalu aktif mengadakan pertemuan-pertemuan. Dikarenakan beberapa anggota yang telah meninggal dan Hersri selaku pendiri telah pulang ke Indonesia. Di era digital ini, Hersri Setiawan kerap menuliskan ide-idenya di website Indoprogress (Setiawan, 2013)

4. Komite Indonesia

Komite Indonesia merupakan organisasi bentukan eksil yang bergerak dalam bidang politik. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan mengkritisi dan mengawal kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintahan Soeharto. Kritik yang disampaikan melalui tulisan-tulisan, gerakan-gerakan dan aksi demonstrasi yang berisikan menentang pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Soeharto. Pasca 1998, setelah Soeharto lengser, Komite Indonesia juga turut selesai karena merasa tuntutan yang diajukan selama ini sudah cukup.

5. Perhimpunan Dokumentasi Indonesia (Perdoi)

Perdoi didirikan oleh Sarmadji di kediamannya, Amsterdam. Ia mengumpulkan ribuan arsip, buku, koran, majalah, buletin Indonesia dengan sangat telaten di rumah pribadinya. Sarmadji mengumpulkan seluruh arsip dan dokumen 1965-1966. Menurut Sarmadji, Perdoi diibaratkan sebagai monumen peringatan bagi mereka yang dicabut paspornya dan meninggal di luar negeri. Buku-buku tersebut beberapa diantaranya adalah pemberian dari para eksil yang telah meninggal, atau kiriman-kiriman dari Indonesia (Huda, 2018).

Selain mengumpulkan arsip dan buku-buku, Sarmadji juga melakukan pencatatan para eksil yang tinggal di Belanda. Pencatatan tersebut meliputi data diri, alamat, nomor telepon dan beberapa riwayat penting lainnya. Data tersebut dihimpun dalam 7 buku catatan yang dimulai sejak tahun 1994. Sejak tahun 1994, Sarmadji mengungkapkan bahwa jumlah eksil yang datanya mau dicatat berjumlah 416 orang, beberapa eksil lain tidak mau dicatat data dirinya (Amaria, 2022)

6. Yayasan Lembaga Pembela Korban 1965

LPK 65 diketuai oleh MD Kartawpawira dan I Putu Gede Arka sebagai wakil ketua. Sebelum mendirikan LPK 65, Kartapawira bersama Wiyanto lebih dulu mendirikan *Indonesia Law Reform Workender* (ILRWI di awal tahun 2000 sebagai organisasi bidang hukum dengan konsentrasi masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Penjabaran dari beberapa organisasi yang didirikan oleh para eksil memberikan fakta kepada kita semua, kendati mereka mengalami penghapusan status hukum dan kewarganegaraan Indonesia. Mereka terus berusaha mempertahankan budaya, bahasa dan juga aktif mengikuti dinamika politik Indonesia dari Belanda. Beberapa di antara mereka terlibat dalam gerakan intelektual yang menyerukan reformasi dan demokoratisasi. Aktivitas ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan bukan hanya soal status hukum, tetapi juga keterlibatan aktif dalam komunitas politik dan nasional (Fadila Alimah Asrarudin, 2024). Kegiatan para eksil dalam organisasi-organisasi tersebut seperti diskusi, pertemuan rutin, perayaan HUT RI hingga pengajuan pertanggung jawaban negara

atas pelanggaran HAM ke Mahkamah Internasional adalah bentuk kerja sama nyata yang luar biasa. Keterikatan mereka tersebut tidak lain karena penanaman ideologi nasionalisme yang dibangun erat dan kuat.

D. Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Eksil Pasca 1998

Hubungan antara para eksil dan tanah air selama periode pengasingan ditentukan oleh pemerintah melalui sikap kedutaan Indonesia. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, rezim pemerintahan selanjutnya mulai melakukan pendekatan simpatik terhadap para eksil. Hal ini dikarenakan desakan dari para korban, aktivis, dan simpatisan agar para pemerintah segera meminta maaf dan mengembalikan hak-hak korban tragedi 1965, termasuk para eksil.

Diawali dengan pidato Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 10 Desember 1999 saat peringatan Hari HAM Internasional yang secara langsung mengundang para eksil untuk kembali ke Indonesia. Selain itu, Gus Dur berusaha mengembalikan hak-hak mantan tahanan politik dan para orang di pengasingan. Di samping itu, Gus Dur juga mengambil langkah untuk melakukan penghapusan Tap MPRS No. XXV/1966 yang berisi pelarangan PKI dan pengharaman ajaran komunisme, marxisme, leninisme di Indonesia. Menurutnya, Tap MPRS tersebut tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku (Prihatin, 2022)

Pertemuan Orang Terhalang Pulang

Langkah Awal Rekonsiliasi

Den Haag, Kompas

Ratusan orang Indonesia yang terhalang pulang, karena kebijakan pemerintah Orde Baru yang melarang mereka pulang ke Indonesia pada tahun 1965, bertemu Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ilza Mahendra dan Duta Besar RI untuk Belanda Abdul Isnan di Den Haag. Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal rekonsiliasi nasional.

"Saya sudah menderita karena sikap pemerintah yang kejam di masa lalu. Sekarang saya sudah berusia 75 tahun. Saya tidak memiliki harapan lain, kecuali agar apa yang telah dialami Indonesia dalam 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang penuh ketidakadilan, jangan dialami kembali oleh anak, cucu, dan cicit kita," ungkap Ny Fransisca Fungidaj, mantan anggota MPRS/DPRGR yang sejak tahun 1965 tak bisa kembali ke Indonesia.

Fungidaj yang mantan wartawan menyebutkan, dia meninggalkan Indonesia tanggal 18 September 1965, karena ditugaskan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengikuti konferensi International Organization of Journalist di Cile. Awal Oktober 1965, suami serta anak sulungnya di Indonesia ditangkap dan status kewarganegaraannya dicabut, tanpa proses peradilan.

"Kesalahan harus dibetulkan,

dan kejahatan harus dihukum supaya tidak memberikan peluang pengulangan kembali ke-10. Saya kini hanya ingin, hak politik dan sipil sebagai warga negara Indonesia bisa dipulihkan. Saya hanya ingin hidup tanpa rasa takut dikejar, dibunuh atau dipenjara," tuturnya lagi.

Wartawan Kompas Tri Agung Kristanto dan Denny Setoyog Gerberding yang ikut pada pertemuan Serin (17/1) malam melaporkan, orang Indonesia yang terhalang pulang yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari Jerman, Republik Ceko, Perancis, Rusia, serta Belanda. Tampak hadir antara lain Sukit Kertapati, mantan anggota Komite Central Partai Komunis Indonesia (CC PKI) yang kini harus diadili di kursi roda, Koedion Boediman yang pernah aktif di Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra), bekas Bendahara PWI Omar Said, MT Sirring, dan Ibrahim Isa. Sebagian dari me-



Yusril Ilza Mahendra

reka adalah mahasiswa ikatan dinas dari Indonesia yang dikirim pemerintah Soekarno belajar di negara Eropa Timur. Pertemuan itu berlangsung akrab. Abdul Isnan mengatakan, pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal rekonsiliasi walaupun pertemuan itu masih harus ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan yang bersifat final. Ini agar masa depan Indonesia kian baik. "Pemerintah sekarang mau membuka lembaran baru dengan segera mungkin menyelesaikan persoalan yang ada, termasuk masalah WNI yang terhalang

pulang ke Tanah Air. Pemerintah ingin menghidupkan status kewarganegaraan dan membuka penangkalan terhadap orang Indonesia yang terhalang pulang, sehingga mereka bisa kembali ke Tanah Air," jelas Yusril.

Bukan buronan

Soeharto, mantan mahasiswa Indonesia tugas belajar yang tinggal di Ceko mengakui, tidak tahu apa kesalahannya, sehingga sampai kini tidak bisa kembali menjadi WNI. Sebagai mahasiswa yang tugas belajar dari Pemerintah Indonesia kala itu, dia memang diharuskan setia pada pemerintah. Tetapi bukan berarti, dirinya adalah pendukung komunis, serta menjadi buronan pemerintah Orde Baru.

Soeharto mengaku, terpaksa menjadi warga negara Belanda karena ada kebijakan dari Pemerintah Indonesia bahwa pemegang paspor Belanda bisa berkunjung ke Indonesia dengan bebas visa kunjungan singkat (BVKS). "Anak dan istri saya tetap menjadi WNI. Namun tahun 1992, saya sempat ditahan Badan Intelijen Strategis dan dilarang masuk ke Indonesia. Anak-anak saya pun menanti waktu itu," katanya lagi.

Soepardi, doktor ekonomi dari Universitas Moskwa merambalkan, sewaktu meremaja pernah belajar dari Presiden Soe-

karno melalui Departemen Perguruan Tinggi, dia memang menandatangani pernyataan kesetiaan kepada pemerintah. "Saya sendiri di luar negeri tidak terlibat dengan G30S/PKI. Tetapi setelah status kewarganegaraan saya dicabut, saya pernah diusir oleh atase pertahanan di KBRI Moskow. Sebab itu, saya merasa sebagai ilusi bisa kembali menjadi WNI," paparnya.

Soepardi juga mengingatkan, persoalan tidak bisa kembalinya mereka ke Indonesia terkait dengan masih adanya Ketetapan (Tap) MPRS Tahun 1966 tentang Larangan Terhadap Marsdisme, Komunisme, dan Leninisme di Indonesia. Dia khawatir, pemulangan kembali orang Indonesia yang terhalang pulang akan terhalang kembali dengan Tap MPRS tersebut.

Yusril menuturkan, pemerintah akan memberikan kemudahan kepada orang Indonesia yang terhalang pulang untuk menjadi WNI kembali, tanpa proses naturalisasi. "Anak dan istri juga paksa kami melampui weveneng dengan memcajut Tap MPRS itu. Karena pencabutan Tap MPRS, adalah weveneng MPR. Jangan membuat kami (pemerintah) mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintahan Habibie dengan membuat kebijakan yang melampui wevenengnya," tegasnya."

Sumber: Kompas, 20 Januari 2000

Di bawah pemerintahan Gus Dur, pengasingan orang-orang yang ‘dibuang’ pada rezim Orde Baru, termasuk para eksil mulai dihapuskan perlahan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Permasalahan Orang-Orang Indonesia Yang Berada di Luar Negeri Dan Terhalang Pulang ke Tanah Air Sejak Terjadinya Peristiwa G30 S/PKI, pada 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Yusril Ihza Mahendra, untuk pergi ke Belanda menemui orang Indonesia di Luar Negeri yang sebelumnya telah dilarang untuk kembali ke Tanah Air sejak meletusnya peristiwa G30S 1965. Adanya regulasi tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia peduli terhadap nasib kaum eksil.

Pengungkapan kebenaran melalui pelurusan sejarah merupakan hal penting dan esensial untuk diwujudkan dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Hingga kini, dalam memori sebagian masyarakat Indonesia bahwa tindak kekerasan 1965-1966 itu harus dilakukan untuk menghalau serangan dari kelompok masyarakat yang berpotensi mengganggu stabilitas negara maupun terkait paham atau ideologi yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila. Pelurusan sejarah sebagai upaya pengungkapan kebenaran harus turut hadir sebagai manifestasi atas pemenuhan hak atas keadilan antar generasi guna memutus rantai trauma terhadap generasi muda di masa mendatang, termasuk pula upaya memutus akar konflik dan menjamin ketidak berulangan. Pengungkapan kebenaran seperti ini harus ditindak lanjuti dengan langkah-langkah yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi korban dan keluarganya yang diikuti dengan proses penegakan hukum dan pemulihan yang efektif (Rumpia, 2024).

KESIMPULAN

Keberadaan para eksil politik Indonesia 1965 di Belanda memainkan peran penting dalam merawat memori sejarah yang dihapus atau diredam oleh negara. Melalui aktivitas budaya, politik, dan penerbitan media alternatif, para eksil menjadi pengarsip hidup atas kekerasan negara dan pelanggaran HAM yang mereka alami. Mereka tidak hanya mempertahankan identitas politiknya sebagai korban, tetapi

juga menjelma menjadi agen ingatan kolektif yang menjaga semangat reformasi dan keadilan dari luar batas teritorial Indonesia.

Lebih jauh, eksil Indonesia di Belanda dapat dilihat sebagai simbol harapan demokrasi yang terus hidup di tengah represi dan pelupaan institusional. Meski terpisah secara fisik dari tanah air, mereka terus terhubung melalui jejaring solidaritas internasional dan partisipasi dalam wacana demokratis. Dalam konteks ini, eksil bukan sekadar kisah pengasingan, melainkan bagian dari narasi perjuangan panjang untuk kebenaran, rekonsiliasi, dan transformasi sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya mendengarkan suara-suara dari pinggiran sejarah sebagai bagian dari proses penyembuhan kolektif bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Primer

Kompas, 20 Januari 2000

Referensi Buku, Artikel, dan lainnya:

Akmaliah, W. (2015). Indonesia yang Dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 dan Kemunculan Eksil Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 65-76.

Amaria, L. (Sutradara). (2022). *The Exile* [Gambar Hidup].

Awaludin. (2024, Februari 29). *Jejak Generasi Intelektual yang Tersapu Gelombang Politik 1965 hingga Terkurung di Luar Negeri*. Diambil kembali dari Nasional Okezone: <https://nasional.okezone.com/read/2024/02/29/337/2977401/jejak-generasi-intelektual-yang-tersapu-gelombang-politik-1965-hingga-terkurung-di-luar-negeri?page=all>

Bonasir, R. (2023, Maret 23). *Peristiwa 65: Ketika menginjakkan kaki di tanah air bukan lagi pulang melainkan berkunjung atau menengok, maukah para eksil kembali menjadi warga negara Indonesia?* Diambil kembali dari BBC NEWS Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64541226>

Fadila Alimah Asrarudin, M. P. (2024). STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DAN NASIB EKSIL 1965: ANTARA PENOLAKAN NEGARA DAN PENGAKUAN HAK SIPIL. *Pakehum: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 7-12.

- Faist, R. B. (2010). *Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Gusnelly. (2017). DIASPORA DAN IDENTITAS KOMUNITAS EKSIL ASAL INDONESIA DI BELANDA. *Jurnal Kajian Wilayah*, 33-44.
- Hill, D. T. (2022). Indonesian Political Exiles in the Netherlands after 1965; Postcolonial Nationalists in an era of Transnationalism Postcolonial Ntionalists in an Era of Transnationalism. *Wacana, Journal of The Humanities of Indonesia*, 577-611.
- Huda. (2018). *Skripsi: Berkelana Tanpa Status Warga Negara: Kehidupan Eksil Indonesia di Belanda (1965-1998)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mudzakir, A. (2015). HIDUP DI PENGASINGAN: EKSIL INDONESIA DI BELANDA. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 170-184.
- Prihatin, S. d. (2022). ANALISIS WACANA KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENGEMBALIAN KEWARGANEGARAAN KORBAN ORDE BARU MELALUI KEWARGANEGARAAN GANDA). *Jurnal Wedana*, 44-54.
- Rumpia, J. R. (2024, November 1). Pengasingan Paksa Eksil Politik Oleh Negara. From Historia: <https://www.historia.id/article/pengasingan-paksa-eksil-politik-oleh-negara>
- Setiawan, H. (2004). Membangun Kembali Budaya Rekonsiliasi. Dalam Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis da Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto* (hal. 70-88). Jakarta: Elsam.
- Setiawan, H. (2013, Agustus 5). Menjadi Eksil, Puisi Eksil, dan Indonesia: Wawancara dengan Agam Wispi. From www.indoprogress.com: <https://indoprogress.com/2013/08/menjadi-eksil-puisi-eksil-dan-indonesia-wawancara-dengan-agam-wispi/>
- Sipayung, B. A. (2011). *Exiled Memories: The Collective memory of Indonesian 1965 exiles*. Netherlands: Institute of Social Studies.
- Tempo.co. (2023). *Jokowi Akan Nyatakan Sejumlah Eksil 1965 Bukan Pengkhianat Negara*. Jakarta: Tempo.co.
- Untung, B. (2016, November 13). *Konferensi Internasional Tragedi 1965-66 | Frankfurt | 9-13 November 2016*. Diambil kembali dari ypkp1965.org: <https://ypkp1965.org/blog/2016/11/30/konferensi-internasional-tragedi-1965-66-frankfurt-9-13-november-2016/>